

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir tahun 2010 hingga awal 2011, kawasan Timur-Tengah mengalami pergolakan politik berupa Revolusi, yang bertujuan untuk menumbangkan penguasa otoriter di negara-negara kawasan Timur-Tengah, yang dimulai dari Tunisia menyusul Mesir, Aljazair, Yaman, Bahrain, Libya dan negara-negara yang berada di Timur-Tengah. Namun, baru tiga pemimpin negara yang harus meninggalkan jabatannya, yakni mantan Presiden Tunisia Zine Abidin Ben Ali, mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak, dan mantan Presiden Libya Moammar Khadafi. Sedangkan pemimpin negara lainnya belum dipastikan, karena negaranya masih bergejolak menuntut pengunduran diri para pemimpin di negara-negara Timur-Tengah.

Peristiwa yang memicu terjadinya revolusi dimulai dari kasus “aksi bakar diri” seorang pemuda bernama Muhamed Bouazizi di Tunisia sebagai bentuk ekspresi keputusasaan yang tidak menemukan jalan keluar atas kondisi ekonomi yang dihadapinya, perlakuan kasar dari pihak keamanan negaraya berupa perlakuan pembakaran terhadap lapak jualannya, sejak aksi bakar diri tersebut, menjadi pemicu demonstrasi yang mengarah pada tuntutan pengunduran diri Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali. rakyat Tunisia sudah tidak percaya lagi kepada pemerintahnya, Korupsi dinilai telah menodai nilai perjuangan rakyat

untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Imbasnya adalah pengangguran merata, pengangguran dan tingginya biaya hidup turut mengobarkan rakyat Tunisia untuk bangkit dari keterpurukan akibat tidak adanya perhatian dari pemerintah yang berkuasa.

Rangkaian protes dan demonstrasi di seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara dikenal sebagai "Musim Semi Arab", dan kadang disebut sebagai "Musim Semi Arab dan Musim Dingin Arab", "Kebangkitan Arab" atau "pemberontakan Arab". Pada Februari 2011, tiga pemerintah digulingkan di tiga negara. Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali melarikan diri ke Arab Saudi pada tanggal 14 Januari 2011 menyusul protes revolusi Tunisia. Di Mesir, Presiden Hosni Mubarak mengundurkan diri pada 11 Februari 2011 setelah 18 hari protes besar-besaran, mengakhiri 30 tahun rezim otoritariannya.

Menurut David Potter dalam essaynya—*Explaining Democratization*—ia menyimpulkan bahwa tatanan dunia saat ini hanya mengenal tiga jenis utama rezim politik dunia, yaitu demokrasi liberal, *partial democracy* dan otoritarianisme, serta dua jenis lain yang disebutnya dengan demokrasi langsung dan demokrasi partisipatif¹. Demokrasi liberal dicirikan oleh pembuatan keputusan dan aturan yang mengikat melalui sistem perwakilan yang akuntabel terhadap masyarakat. Akuntabilitas ini dijamin utamanya melalui sebuah pemilu yang bebas, jujur dan kompetitif, dimana secara transparan pria dan wanita

¹ David Potter, "Explaining Democratization", dalam *Democratization*, 2000, Cambridge: Polity Press

dewasa memiliki hak suara yang sama. Hal ini sangat bertolak belakang dengan rezim otoritarian yang lebih ditandai oleh para pemimpin yang mengarahkan dan mengatur masyarakat tanpa adanya akuntabilitas terhadap masyarakatnya itu. Selain itu, rezim otoritarian ini dicirikan dengan tidak adanya pemilu yang kompetitif, ditabukannya kritik atas pemerintah, kondisi sosial ekonomi dan ideologi negara, serta ancaman bagi warga yang melanggarnya. Sementara itu, yang disebut dengan demokrasi parsial—campuran dari kedua rezim sebelumnya—lebih dilihat pada adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi alternatif, serta adanya organisasi independen namun dengan pengawasan ketat dari pemerintah².

Rupanya ketiga model rezim tersebut tidaklah saling berdiri sendiri, namun mencerminkan sebuah hubungan perubahan yang ditandai dengan lahirnya proses transisi demokrasi, yaitu sebuah perubahan dan pergantian rezim dari yang sebelumnya dinilai otoriter menuju sebuah sistem yang lebih demokratis dengan ciri adanya pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dihargainya suara-suara minoritas dan lain sebagainya. Proses transisi inilah salah satu fenomena yang sering dibahas oleh para ilmuwan beberapa dekade terakhir. Pascaberakhirnya era kolonialisme di Asia dan di Afrika serta diiringi oleh semakin berkurangnya jumlah pemerintahan monarki di dunia, nampaknya semakin menunjukkan bahwa

² *Ibid.*, hal. 5

sistem atau rezim pemerintahan liberal lebih “disukai” daripada rezim yang otoriterianisme yang sering dinilai mengekang kebebasan rakyatnya³.

Begitu juga dengan gejolak yang terjadi di Tunisia dan Mesir—gelombang demokratisasi—awal tahun 2011 lalu⁴. Katalis untuk terjadinya transisi politik di Tunisia adalah protes bakar diri dari Mohamed Bouazizi. Lulusan perguruan tinggi, ia tidak dapat menemukan pekerjaan dan menjual buah di kios pinggir jalan sampai polisi menyita barang dagangannya. Hari berikutnya, 17 Desember, ia menyiram dirinya dengan bensin dan membiarkan dirinya terbakar. Kematianya pada tanggal 4 Januari dibawa bersama berbagai kelompok yang tidak puas dengan sistem yang ada, termasuk banyak pengangguran, politik dan aktivis HAM, buruh, serikat buruh, mahasiswa, dosen, pengacara, dan lain-lain untuk memulai Revolusi Tunisia.

Setelah bakar diri Mohamed Bouazizi di Sidi Bouzid, serangkaian demonstrasi jalanan semakin keras hingga Desember 2010. Akhirnya Presiden Zine El Abidine Ben Ali dipecat pada 14 Januari 2011. Demonstrasi itu dimulai dengan pengangguran yang tinggi, inflasi makanan, korupsi, kurangnya kebebasan berbicara dan bentuk-bentuk kebebasan politik, dan kondisi hidup yang buruk. Protes merupakan gelombang paling dramatis dari kerusuhan sosial dan

³ Lebih lanjut lihat Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man*, 1992, New York: The Free Press

⁴ seperti yang pernah dikemukakan Theda Skocpol dalam “*States and Social Revolution: A Comparative Analysis of France, Russia, and China*” revolusi merupakan perubahan yang cepat dan mendasar dari masyarakat dan struktur kelas dalam sebuah Negara.

politik di Tunisia dalam tiga dekade, dan telah menghasilkan puluhan kematian dan cedera, yang sebagian besar adalah hasil dari tindakan oleh polisi dan pasukan keamanan terhadap demonstran. Ben Ali melarikan diri ke pengasingan di Arab Saudi, mengakhiri 23 tahun kekuasaannya.

Protes di Mesir mulai pada tanggal 25 Januari dan berjalan selama 18 hari hingga tanggal 11 Februari 2011. Warga dari berbagai kalangan berburai memenuhi jalan akibat ketidakpuasan mereka terhadap keadaan pemerintahan yang diselenggarakan pemerintah. Berbagai kalangan mulai dari kelompok demonstran oposisi, orang tua sampai anak-anak bergabung bersama menyerukan kekecewaan terhadap pemerintahan⁵. Tetapi pemerintah menanggapi demonstrasi tersebut dengan keras dan tidak menolerir pemberontakan yang direncanakan. Bahkan Hosni Mubarak yang saat itu menjabat presiden menghimbau bahwa masyarakat jangan meniru perjuangan yang dilakukan aktivis di Tunisia. Mubarak menghimbau bahwa keamanan negara adalah prioritas utama dan harus terus diperjuangkan meskipun menimbulkan kerugian⁶.

⁵<http://dunia.vivanews.com/news/read/203760-demonstrasi-di-mesir-didominasi-kaum-pemula-pada-tanggal-13-Agustus-2012-pukul-19:45>

⁶<http://www.detiknews.com/read/2011/01/26/170223/1555183/10/demonstrasi-besar-besaran-di-mesir-200-orang-ditahan> Pada tanggal 14 Maret 2012 pukul 20:00

Demonstrasi yang terjadi di Mesir belakangan ini disebabkan oleh pihak oposisi yang berusaha mencontoh apa yang terjadi di Tunisia⁷. Ketika demonstrasi yang dilakukan warga Tunisia dinilai telah berhasil menjatuhkan rezim, pihak oposisi mendapat keberanian untuk menggelar hal yang serupa di Mesir. Efek domino dari kejadian di Tunisia tersebut berkembang menjadi gerakan massa yang semakin besar dari hari – kehari. Gerakan massa tersebut disebabkan karena masyarakat dinilai sudah jenuh dengan pemerintahan otoriter Hosni Mubarak yang telah ia jalankan selama 30 tahun. Kebijakan yang dilakukan selama 30 tahun tersebut seringkali dinilai tidak pro rakyat karena mementingkan kepentingan segelintir golongan atau kepentingan keluarganya.

Untuk menjelaskan proses demokratisasi tersebut, Potter membuat tiga pendekatan sebagai pisau analisisnya. Pendekatan pertama adalah **pendekatan modernisasi**, yang mengasumsikan bahwa semakin intens negara menjalankan modernisasi, akan semakin demokratis pula negara yang bersangkutan. Pendekatan kedua adalah **pendekatan transisional**, dimana aktor sentral demokratisasi berada pada inisiatif para elit yang memainkan peran utama dalam proses demokratisasi, serta **pendekatan struktural** sebagai pendekatan ketiga,

⁷Fenomena yang terjadi di Mesir ini sering disebut sebagai gejala gelombang demokratisasi ke empat setelah gelombang demokratisasi ketiga (1974 - ?) yang dimulai dengan meninggalnya Jendral Franco di Spanyol yang mengakhiri rejim otoriter/militer di Eropa Tengah pada tahun 1975, ketika Raja Juan Carlos dengan bantuan PM Adolfo Suarez memperoleh persetujuan parlemen dan rakyat untuk menyusun konstitusi baru yang demokratis, dan di Portugal sekelompok perwira militer muda melakukan kudeta kepada Marcello Caetano, sang dikatur jatuh. Lihat pula Samuel P. Huntington, *Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, 1991, Norman, OK: University of Oklahoma Press: Norman Oklahoma.

yang mendasarkan proses demokratisasi pada perubahan struktur kekuasaan⁸. Menurut pendekatan yang terakhir disebutkan ini bahwa penentu proses demokratisasi tersebut adalah perubahan struktur kelas dan kekuasaan yang mendukung proses demokratisasi dengan syarat—yang harus dilakukan—terjadinya perubahan hubungan kekuasaan antara kelas, negara, dan aktor transnasional sehingga mendukung desentralisasi. Dengan pendekatan struktural ini, selanjutnya akan dijelaskan bagaimana proses transisi demokrasi di Mesir terjadi.

Setidaknya ada empat aktor lokal utama yang “bermain” dalam proses demokratisasi di Mesir. Pertama adalah kalangan militer yang terakhir diketahui berperan melanjutkan kekosongan pemerintahan yang ditinggal Presiden Mubarak, kedua adalah pihak oposisi lama yang keberadaannya dibatasi namun sangat memanfaatkan betul momentum yang terjadi untuk mendapatkan legitimasinya dengan membentuk sebuah partai politik (kelompok Ikhwanul Muslimin). Pemain yang ketiga dan keempat secara berurutan adalah pihak yang pro dengan Presiden Mubarak dan rakyat yang kontra pemerintahan otoriter Mubarak. Dengan memetakan secara demikian kita dapat memahami struktur masyarakat Mesir sebelum dan sesudah memulainya demokratisasi di negara tersebut. Rakyat yang kontra pemerintah adalah pihak terbesar yang mendukung lahirnya perubahan menuju demokrasi. Dilandasi oleh rasa ketidakpercayaan

⁸ David Potter, *Democratization*, hal. 23

dengan pemerintah yang dinilainya telah gagal mensejahterakan masyarakat, akhirnya munculah sebuah gerakan massa—didukung pula oleh kelompok Ikhwanul Muslimin—yang diawali dengan revolusi digital (internet dan sosial media (Facebook dan Twitter)⁹ lalu kemudian berubah menjadi aksi demonstrasi besar-besaran di jalan.

Gerakan dua juta orang, menyemut, menuntut Mubarak hengkang dari singgasananya sekarang juga¹⁰. Seiring dengan jalannya kehidupan yang semakin tidak kondusif di sana, lama-kelamaan muncul kelompok baru dari pihak pemerintah yang ikut masuk ke dalam barisan demonstran, yaitu kalangan militer. Alhasil bentrokan yang menelan banyak korban jiwa pun tidak dapat dihindari, sebab selain ada pula rakyat pro pemerintah yang ikut turun di jalan, militer (dipihak Mubarak) pun dirasa sangat kuat dan memiliki peran penting untuk meredakan tuntutan yang sedang terjadi. Begitulah penjelasan singkat mengenai struktur masyarakat Mesir sebelum tergulingnya Presiden Mubarak dari kekuasaannya. Kini, pascakejadian tersebut, rupanya kelompok-kelompok tadi khususnya militer dan pihak oposisi (Ikhwanul Muslimin) lebih terlihat menonjol dalam hal perubahan peran dan posisinya setelah mentransformasikan diri menjadi sebuah partai politik (sebelumnya dianggap sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah). Ide pembentukan Partai Kebebasan dan Keadilan (PKK) oleh

⁹ Diakses dari <http://www.satuportal.net/content/dryanuar-nugroho-revolusi-digital-hasilkan-aktivis-klik> pada tanggal 1 Agustus 2012, pukul 16. 30

¹⁰ Diakses dari <http://www.fajar.co.id/read-20110203011300-gemuruh-timur-tengah>, pada tanggal 1 Agustus 2012, pukul 16. 20

kelompok Ikhwanul Muslimin itu datang untuk menerjemahkan pendekatan ini menjadi gerakan politik praktis dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, sehingga struktur pemerintahan negara sudah dinilai memenuhi sebuah struktur rezim yang liberal¹¹.

Inilah babak baru perpolitikan di Mesir ketika rakyat telah benar-benar berdaulat dengan berhasil menumbangkan pemerintahan otoriter dan ketika lahirnya sebuah partai baru dalam struktur politik Mesir yang sebelumnya dianggap sebagai perkumpulan terlarang namun memiliki basis massa yang sangat besar dari total penduduk Mesir. Jadi jelaslah bahwa proses perubahan struktur kelas terjadi, bahkan pasacatransisi tersebut. Di kalangan militer pun tidak ketinggalan ikut "berbenah", menurut Irfan Ridwan Maksam (Guru Besar Tetap FISIP-UI, Advisor Local Governance Watch-UI), sejenak kita bisa tahu bahwa Omar Suleiman dan petinggi militer Mesir sebagai penerima amanat pemegang kendali pemerintahan transisi setidaknya dapat memberi gambaran ke mana sedikitnya perubahan Mesir akan berjalan.

Lalu adakah pengaruh konstelasi politik transnasional terhadap proses demokratisasi di Mesir. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa apa yang terjadi di Tunisia serta di Libya (faktor eksternal) memiliki pengaruh besar setidaknya dalam rangka memberikan "model" kepada rakyat Mesir untuk

¹¹ Diakses dari <http://syabab.com/akhbar/dunia/1676-ikhwanul-muslimin-gadaikan-idealismenya-demi-dapatkan-legitimasi-dari-amerika-serikat-dan-masyarakat-internasional.html>, pada tanggal 1 Juni 2012, pukul 16.46

melakkan hal serupa, apalagi faktor internal (kemiskinan, ketidaksejahteraan masyarakat, kesenjangan sosial, dll) yang melecut peristiwa tersebut sudah sangat tidak tertahankan. Negara lain seperti Amerika juga memiliki peran besar dalam proses demokratisasi yang terjadi. Kita ketahui bahwa selama ini Amerika adalah sekutu dekat Mesir di Timur Tengah sejak negara itu masih menerapkan sistem otoriter. Namun kembali saat ini kita melihat bagaimana Amerika menerapkan standar gandanya demi keuntungan pribadi semata. Berulang kali pidato Presiden Obama pun mengarah pada anjuran untuk segera diakhirinya pemerintahan otoriter yang sedang berlangsung menuju sistem demokrasi (liberal).

Sebagai negara yang amat memiliki kepentingan terhadap Mesir, Amerika meminta masyarakat Mesir belajar dari Indonesia¹². Hal ini menunjukkan bahwa Amerika melalui kebijakan kontradiktif, tengah berupaya menjaga kepentingannya di kawasan, terlepas dari siapa yang akan berkuasa di negara-negara yang diterpa badai revolusi. Menurut perspektif mereka, Mesir adalah sebuah faktor kunci dan penentu di kawasan Timur Tengah. Jika Amerika tidak mampu lagi mengontrol sistem otoriter di Mesir, maka negara itu harus menunggangi gelombang tuntutan demokrasi dan tampil sebagai pendukung revolusi rakyat. Transisi kekuasaan dari Mubarak kepada Dewan Tinggi Militer Mesir dan penegasan dewan itu untuk melaksanakan semua perjanjian internasional, termasuk kesepakatan Camp David dengan Israel, adalah sinyal atas

¹² Diakses dari <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/382619/>, pada tanggal 2 Juni 2011, pukul 17.00

kebenaran analisa sebelumnya dan beberapa pengamat. Maka sekilas dirasa tidak akan terjadi perubahan yang signifikan dalam kebijakan dalam maupun luar negeri Mesir pascaterjadinya proses transisi tersebut selama kepentingan politik Amerika masih ada¹³.

Dari latar belakang inilah Penulis mengangkatnya kedalam sebuah judul: *Pengaruh Faktor Eksternal pada Transisi Politik di Tunisia 2010 dan Mesir tahun 2011*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor eksternal mempengaruhi transisi politik di Tunisia tahun 2010 dan Mesir tahun 2011?

C. Kerangka Pemikiran

Keberhasilan Mesir dalam melakukan transisi politik dalam negeri yang semula otokrasi menjadi demokrasi tidak terlepas dari beberapa faktor eksternal yang turut memberikan pengaruh yang besar serta kepentingan negara lain di Mesir. Arus utama teoritisasi transisi menuju demokrasi dimulai pada dekade 1980-an. Secara mencolok dibangun atas dasar runtuhnya rezim otoritarian-

13

Diakses dari http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=31537&Itemid=95, pada tanggal 1 Juni 2011, pukul 17. 30

totalitarian yang tumbuh di kawasan Eropa Selatan dan Amerika Latin. Berbagai karya perintis terutama buah karya suntingan Guillerno O 'Donnel, Philippe Schmitter dan Laurence Whitehead, sering menjadi pusat rujukan bagi studi demokrasi, tetapi tidak punya kekuatan komparatif untuk menjelaskan gelombang transisi demokrasi yang problematik dari rezim neopatrimonial yang eksis di berbagai negara seperti Filipina, Zaire, Haiti, Rusia dan juga Indonesia.

Transisi dari rezim otoriter dimulai dari perpaduan antara perpecahan elite maupun bangkitnya masyarakat sipil dan oposisi yang memungkinkan transisi berjalan. Transformasi dari atas atau lewat negosiasi (*transplacement*) antara kubu garis keras dan kubu garis lunak yang beraliansi dengan barisan oposisi dan masyarakat sipil. Permulaan jalur-jalur negosiasi itulah yang membuahkan transisi yang mulus dan sempurna dari rezim otoriter korporatif sehingga sangat mempermudah tugas-tugas konsolidasi demokrasi berikutnya.

Menurut Samuel Huntington (1991:44), demokratisasi pada tingkatan yang sederhana mencakup (1) berakhirnya sebuah rezim otoriter, (2) dibangunnya sebuah rezim demokrasi, (3) konsolidasi. Jika mengikuti Robert A. Dahl (1991:54), demokratisasi berarti Proses perubahan rezim otoritarian (hegemoni tertutup) yang tidak memberi kesempatan pada partisipasi dan liberalisasi menuju poliarki yang memberi derajat kesempatan partisipasi dan liberisasi Usasi yang lebih tinggi. Transisi demokrasi pada suatu negara menurut Lipset (1963).

Terjadi apabila terjadi pertumbuhan ekonomi dan penambahan masyarakat terdidik. Ia beralasan, dengan masyarakat yang telah sejahtera secara ekonomi

dan semakin tingginya tingkat pendidikan akan semakin terbuka mekanisme pengambilan keputusan untuk urusan-urusan publik, dan semakin terbukanya kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan keputusan yang penting, yang menyangkut kepentingan publik. Argumen yang sama tetapi dengan perspektif dan metode yang berbeda juga diungkapkan oleh Moore (1996) Kalau Lipset lebih bertumpu pada paradigma modernisasi, yang menyetujui lahirnya masyarakat kapitalis, sedangkan Moore, lebih bertumpu pada perubahan cara produksi feodalis ke cara produksi kapitalis.

Sedangkan menurut O'Donnell, Schmitte", dan Whitehead (kelompok sarjana-sarjana kiri) yang memfokuskan studi di Amerika Latin, beranggapan bahwa pembangunan di negara-negara terbelakang dengan kapitalisme barat mensyaratkan adanya stabilitas politik dengan menekan partisipasi massa dalam politik untuk mengamankan pembangunan ekonomi dan modal kapitalis mancanegara. Agen yang paling memungkinkan untuk menciptakan stabilitas politik ini adalah negara. di bawah komando militer. Oleh karena itu menurut O'Donnell pembangunan di negara-negara terbelakang bukannya mendorong demokrasi, di mana peran negara menjadi begitu sentral, sementara massa disingkirkan dari proses politik. O'Donnell menyebut fenomena ini sebagai *Bureaucratic authoritarianism*.

Kritik terhadap *Bureaucratic authoritarianism* telah banyak dilakukan, termasuk oleh R. William Liddle dan Saiful Mujani (2000:56), thesis O'Donnell ini dibangun atas dasar pilihan atas kasus (*case selection*) secara selektif sehingga

bias. O'Donnell tidak menghiraukan pembangunan ekonomi di negara-negara "si Timu.- seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Hongkong pada tahun 80-an. Mereka melakukan demokratisasi di negaranya dengan bertumpu pada ekonomi pasar termasuk di Asia Tenggara negara-negara Bekas Uni Soviet, dan Eropa Timur.

Menurut Liddle dan Mujani setelah O'Donnell mengetahui bahwa argumen *Bureaucratic authoritarianism* tidak realistis, penghujung tahun 80-an beralih ke pendekatan elite untuk menjelaskan variasi muncul dan stabilnya demokrasi. Mereka berkesimpulan bahwa, munculnya rezim demokrasi adalah suatu "kebetulan" sejarah yang tidak bisa dijelaskan. Elit dinilai penting dalam proses transisi ke rezim demokrasi tetapi kapan elit menjadi pro demokrasi dan kapan tidak, menurutnya tidak bisa dijelaskan. Konsep ini juga telah dikritik oleh Przeworski dan Sprague, yang datang juga dari lingkaran Kiri. Elit melakukan pro demokrasi karena mereka menggunakan *rational choice theory* (Almond , 1990:117).

Menurut pendekatan ini elit ini, diasumsikan bahwa transisi dari rezim nondemokrasi ke rezim demokrasi sebagian besar ditentukan oleh inisiatif, kompromi, dan kalkulasi rasional elit politik. Pilihan atas demokrasi dipandang memungkinkan elit mencapai tujuan politiknya. Motif dan kalkulasi elit seperti ini tentu saja akan ditemukan dikalangan elit politik pada umumnya.

Secara umum demokratisasi mencakup beberapa proses atau tahapan yang saling berkaitan, yaitu: liberalisasi, transisi, instalasi dan konsolidasi. Liberalisasi

adalah proses mengefektifkan hak-hak politik yang melindungi individu dan kelompok sosial dari tindakan sewenang-wenang atau tidak sah yang dilakukan oleh negara atau pihak ketiga (O'Donnell & Philippe Schmitter, 1986). Pada tahap ini biasanya ditandai kekuasaan untuk membuka peluang terjadinya kompetisi politik, dilepaskannya tahanan politik, dan uiberikannya ruang kebebasan pers.

Ada dua catatan yang bisa diajukan terhadap O'Donnell khususnya pada proses sebelum memasuki tahap transisi. Dia tidak melakukan elaborasi yang menyeluruh mengenai tahap *decomposing politics* sebelum tahap liberalisasi. Tahap lain selain liberalisasi adalah transisi, yaitu titik awal atau interval (selang waktu) antara rezim otoritarian dengan rezim demokrasi. Transisi diawali dengan keruntuhan rezim otoriter lama yang kemudian diikuti dengan pengesahan lembaga politik peraturan politik baru di bawah payung demokrasi. Pada tahap ini ditandai dengan adanya pemilu. Dalam konteks Indonesia tidak partai perubahan format politik baru yang secara diametral berubah dari format masa sebelumnya.

Setelah transisi yaitu konsolidasi. Proses konsolidasi jauh lebih kompleks dan panjang dibandingkan transisi. Ia merupakan proses yang mengurangi kemungkinan pembalikan demokrasi. Didalamnya diwarnai proses negosiasi. Pada fase ini partai politik perlu melakukan pelatihan terhadap kader-kadernva; medi massa, asosiasi-asosiasi perdagangan; lembaga-lembaga swadaya masyarakat perlu mengembangkan kapasitasnya untuk bertindak secara mandiri terlepas pada pengaruh negara dan 'payung' negara. Pada tahap ini sering juga

disebut sebagai tahap kampanye yang digerakkan pada dua front sekaligus. Di satu pihak adalah perjuangan melawan kekuatan-kekuatan anti-demokratis yang mungkin tidak pernah mau mengalah. Di pihak lain adalah perjuangan menampung unsur-unsur yang bersifat memecah belah dari sistem politik itu sendiri, misalnya persaingan memperebutkan jabatan di pemerintahan dan godaan untuk memperlakukan politik sebagai sebuah pertandingan di mana para pemenangnya yang menguasai semua hadiah.

Minimal ada empat komponen atau pilar utama dari demokrasi yang sedang berjalan, yaitu pemilihan umum yang bebas dan adil, pemerintahan yang bertanggung jawab, hak-hak politis dan sipil, dan suatu masyarakat yang demokratis atau masyarakat Madani (Beetham & Boyle, 1995: 57-58).

Selain faktor domestik, proses demokratisasi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang terjadi dalam bentuk *contagion*, *control*, *consent* dan *conditionally*. *Contagion* terjadi saat demokratisasi di sebuah negara mendorong demokratisasi di negara lain. Proses demokratisasi di negara-negara Eropa Timur dan Afrika Utara merupakan contoh yang signifikan. Sedangkan, *control* terjadi ketika sebuah pihak diluar negara berusaha menerapkan demokrasi di negara tersebut. Misalnya Doktrin Truman 1947 mengharuskan Yunani untuk memenuhi beberapa kondisi untuk mendapatkan status sebagai “negara demokrasi” dan karenanya berhak menerima bantuan anti komunisme dari Amerika Serikat (Laurence Whitehead dalam O’Donnell, 1986: 5). *Consent*, terjadi karena ekspektasi terhadap demokrasi muncul dari dalam negara sendiri karena warga negaranya melihat

bahwa sistem politik yang lebih baik, seperti berjalan di negara demokrasi lain yang telah mapan, akan bisa juga dicapai oleh negara tersebut, seperti saat runtuhnya Uni Soviet dan gelombang informasi liberal ke Eropa Timur (Schmitter, 1993: 5). Bentuk keempat dari dimensi internasional dalam proses demokratisasi adalah *conditionally*, yaitu tindakan yang dilakukan oleh organisasi internasional yang memberi kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi negara penerima bantuan (Vermonte, 2007).

Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan bagaimana kemudian gejolak pergerakan atas hubungan negara yang satu dengan negara lainnya, misalnya saja pelibatan antara Rusia dan China terhadap Suriah dengan mencari keuntungan semaksimal mungkin karena adanya pola kepentingan nasional yang harus dipenuhi. Kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan bagaimana karakter suatu negara dalam berinteraksi di luar internal negara. Kepentingan nasional juga mengarahkan para pembuat keputusan untuk dalam merumuskan kebijakan luar negeri suatu negara seperti hankam, militer, sosbud dan kesejahteraan ekonomi.

Menurut Hans J. Morgenthau kepentingan nasional adalah :

Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan dan pengendalian itu bisa diciptakan melalui teknik – teknik pakasaan maupun kerjasama¹⁴

Adanya konsep kepentingan nasional menurut Morgenthau pada dasarnya terdiri dari dua elemen, yang pertama didasarkan pada pemenuhan kebutuhan sendiri dan yang kedua mempertimbangkan berbagai kondisi lingkungan strategis disekitarnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan itu sendiri dimana setiap kerjasama atau hubungan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dalam kerjasama tersebut pasti mengutamakan kepentingan nasional.

Konsep kepentingan nasional di atas akan tercapai bila terjadi interaksi atau hubungan luar negeri. Kepentingan tersebut mempengaruhi cita-cita, aspirasi dan tujuan suatu negara serta akan menentukan pengambilan sikap negara tersebut terhadap bangsa lain. Hal inilah yang akan menentukan cara dan pendekatan untuk merealisasikan cita-cita dan wawasan suatu bangsa ke dalam tindakan, baik bilateral maupun regional. Dengan melihat kondisi hubungan internasional yang kontemporer, negara memiliki cara masing-masing untuk menunjukkan eksistensinya, namun tak terlepas dari tujuan dari negara tersebut, karena kuncinya berada pada kepentingan nasional yang merupakan bentuk kebijakan

¹⁴Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin Dan Metodologi, Ulasan Tentang Morgenthau Mengenai Konsep Nasional*. PT Pustaka LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 139,

dan pertimbangan nilai pada realitas politik. Untuk itu kerjasama bilateral dalam memperoleh peluang keuntungan harus selaras dengan tujuan nasional suatu negara. Kepentingan nasional menurut *Donald Nuechterlein*, adalah:

*kepentingan yang dirasakan dan diinginkan oleh beberapa negara yang berdaulat yang mencakup pula lingkungan externalnya*¹⁵

Kepentingan nasional tersebut merujuk kepada kepentingan bersama suatu masyarakat dalam sebuah negara dan kepentingan bersama itulah yang diwujudkan dalam kepentingan nasional dengan melihat beberapa aspek yang penting dalam menjaga keutuhan dan pertahanan negara, dan kepentingan nasional tersebut yang menjadi landasan bagi terciptanya hubungan bilateral antar dua negara.

D. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Transisi Politik di Tunisia dan Mesir di pengaruhi oleh faktor faktor eksternal :

1. Peranan Media Sosial di internet dan Media Massa
2. Bantuan Ekonomi dan Kepentingan Amerika Serikat

¹⁵ Clinton, W. David, 1994, *The Two Face of National Interest*. America : Louisiana State University Press hal. 31

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe deskriptif analitik yaitu berusaha menggambarkan pengaruh faktor eksternal dalam proses transisi politik yang dilakukan oleh Tunisia dan pengaruhnya terhadap transisi politik di Mesir dalam rangka menjadi negara yang lebih demokratis.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah berupa telaah pustaka (*Library Research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dari literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang di bahas berupa buku-buku, dokumen, jurnal, surat kabar atau majalah, dan artikel di situs-situs internet.

3. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, makalah, surat kabar/majalah dan artikel-artikel dari internet, yang berkaitan dengan masalah penelitian yang penulis bahas. Data-data tersebut berupa fakta-fakta yang terkait dengan transisi politik di Tunisia dan Mesir.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisa kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan telaah statistik dan matematik tetapi menggambarkan permasalahan berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dimana data yang diperoleh akan disusun dalam suatu tulisan. Angka-angka statistik hanya digunakan sebagai data penunjang dan pelengkap dari fakta-fakta yang akan dipaparkan dalam penelitian ini.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses transisi politik di Tunisia dan pengaruhnya pada transisi politik di Mesir tahun 2011.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi transisi politik di Mesir tahun 2011.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat berguna secara:

- a. Akademis, yaitu sebagai sarana dan referensi bagi peminat-peminat masalah Hubungan Internasional sekaligus sebagai informasi bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional khususnya menyangkut masalah transisi politik sebuah negara.

- b. Pragmatis, yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dan keputusan (*decision maker*) dalam menyikapi faktor eksternal dan pengaruhnya bagi kondisi politik sebuah negara.

G. Batasan Penelitian

Tidak ada batasan waktu yang eksplisit dalam penelitian ini, namun penelitian ini akan berusaha untuk melihat pengaruh faktor-faktor eksternal terhadap transisi politik di Tunisia dan Mesir secara komprehensif.

H. Rencana Sistematika Penulisan

Tulisan ini akan disusun dengan menggunakan metode analisis yang sudah dipaparkan dalam kerangka pemikiran, yaitu dengan menggunakan teori *Snowball* dan demokratisasi, sistem internasional, globalisasi, dan *national interest*.

Bab I berisi pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan permasalahan, kerangka pemikiran, argumen pokok, metode penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian dan rencana sistematika penulisan.

Bab II akan membahas mengenai membahas mengenai transisi politik di Tunisia.

Bab III akan membahas mengenai situasi dan proses transisi politik Mesir.

Pada bab IV akan membahas mengenai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi transisi politik di Tunisia tahun 2010 dan Mesir tahun 2011.

Bab V berisi kesimpulan dari penulisan skripsi ini.